

ANOMALI *BANDWAGON EFFECT* DAN MOMENTUM PARTAI POLITIK MERAH SUARA PADA PEMILU 2024

Didin Sabarudin

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

E-mail: didinsabarudin@ukri.ac.id

Abstract: *The 2024 presidential and legislative elections show anomalies in the vote results. Prabowo Subianto won the Presidential seat for the 2024-2029 period with a majority vote that dominated 36 provinces out of 38 provinces in Indonesia, so it did not have a significant impact on his political party, namely Gerindra obtained a majority of legislative seats, even dropping to third place compared to the 2019 election which was in second place. The personal impression of the President-elect did not have any impact even though the support from survey institutions and various media platforms became a looking glass effect for the blessings of electoral politics for the Gerindra party. In fact, the electoral effect obtained by other parties from those who supported and did not support the President, which increased significantly by double digits from the previous election. The article in this study uses an exploratory qualitative method with a case type, where the bandwagon effect of the Presidential election supported by horse-race journalism contributes or does not contribute to political parties' vote acquisition in understanding the natural social context phenomenon on political party relations, elections and their subsequent impacts. The media and survey institutions with the various channels and platforms they use play a key role in post-reform elections with the results becoming a reference for the public to see the level of electability of presidential and legislative candidates, especially for young people as the majority of voters who reach 55% of the voting population. In fact, with various methods, they can increase vote acquisition, can change election results through their various skills, and help their candidates to defeat their competitors, so that in this context survey institutions become business entities with high pay rates.*

Keywords: *election, political parties, survey, journalism, impact*

Abstrak: Pemilu Presiden dan legislatif 2024 menunjukkan anomali dalam perolehan hasil suara. Prabowo Subianto memenangkan kursi Presiden periode 2024-2029 dengan suara mayoritas yang mendominasi 36 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia, lantas tidak berdampak signifikan bagi parpolnya, yaitu Gerindra memperoleh kursi mayoritas legislatif, bahkan turun ke peringkat tiga dibandingkan pemilu 2019 yang berada di peringkat dua. Impresi pribadi Presiden terpilih tidak memberi dampak ikutan meski dengan dukungan lembaga survei dan beragam platform media menjadi efek *looking glass* berkah politik elektoral bagi partai Gerindra. Efek elektoral malahan diperoleh partai lainnya dari pengusung dan bukan pengusung Presiden yang melejit signifikan dua digit dari pemilu sebelumnya. Tulisan dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif berjenis kasus, dimana *bandwagon effect* pemilu Presiden didukung oleh *horse-race journalism* berkontribusi atau tidak berkontribusi pada perolehan suara partai politik dalam memahami fenomena konteks sosial secara alamiah terhadap relasi partai politik, pemilu, dan dampak ikutannya. Media dan lembaga survei dengan berbagai kanal dan platform yang digunakannya memegang peran kunci dalam pemilu pasca reformasi dengan hasilnya menjadi acuan masyarakat untuk melihat tingkat keterpilihan calon presiden dan legislatif, terutama bagi kaum muda sebagai pemilih mayoritas yang mencapai 55% dari populasi pemilih. Bahkan dengan beragam caranya bisa mendongkrak perolehan suara, bisa merubah hasil pemilu melalui bermacam keahliannya, dan membantu kandidatnya untuk mengalahkan pesaingnya, sehingga dalam konteks ini lembaga survei menjadi entitas bisnis dengan tarif bayaran tinggi.

Kata Kunci: pemilu, parpol, survei, jurnalisme, dampak

PENDAHULUAN

Perhelatan pemilu serentak eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR) 2024 telah usai diselenggarakan dengan hasil berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara KPU melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360 Tahun 2024 dari jumlah pemilih sebesar 164.270.475 untuk pemilu Presiden dimenangkan oleh pasangan H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59%, sedangkan dua kandidat pesaingnya yaitu pasangan Anies Rasyid Baswedan, Ph.D-Dr. (HC) H.A. Muhaimin memperoleh suara 40.971.906 atau 24,95%, dan pasangan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P-Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD mengumpulkan 27.050.878 suara atau 16,47% dari suara sah. Jumlah total pemilih pemilik hak untuk memilih dan dipilih yang dirilis KPU tercantum dalam DPT sesuai persyaratan UU nomor 7 tahun 2017 adalah 204.807.222 orang dengan prosentase pemilih laki-laki dan perempuan berimbang diantara keduanya berjumlah 102.218.503 orang dan 102.588.719 orang (www.kpu.go.id diakses 5 April 2024). Data Sensus Penduduk 2020 tercatat jumlah generasi Z mencapai sekitar 75 juta atau 27,94% dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 69 juta atau 25,87%. Dari jumlah tersebut, pemilik suara muda merupakan mayoritas sebanyak 55% atau 114 juta orang yang terdiri dari generasi Z sebanyak 28,6% dan generasi milenial 34,2% dari pemilih nasional.

Pasangan H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat yuridis formal konstitusi UUD 1945 pasal 6A Ayat 2 dan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pasal 222 dalam pencalonan Presiden dengan diusung oleh 4 (empat) koalisi partai politik lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% (empat persen) hasil perolehan kursi nasional pada pemilu 2019 serta batas ambang pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya, yaitu partai Gerindra 78 kursi, PAN 44 kursi, Golkar 85 kursi, dan Demokrat 54 kursi dengan total 261 kursi atau setara dengan 45,39% serta didukung oleh parpol non-parlemen dan parpol baru dalam pemilu legislatif 2024, yaitu PBB, Partai Gelora, dan PSI dengan nama Koalisi Indonesia Maju. Meski terjadi gugatan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas parlemen 4%, MK telah memutuskan dengan menguatkan ketetapan UU Pemilu khususnya pasal 414 menyatakan bahwa minimal 4% suara nasional agar partai politik lolos parlemen, Ayat 1: Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, dan Ayat 2: Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Partai politik menjadi pemegang peran utama dan vital dalam seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara dengan diberikan tujuan mulia, mandat dan tanggungjawab oleh konstitusi melalui pemerintahan, *President & Legislative elected* yang diamanatkan konstitusi pula untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum (Sabarudin, 2023). Partai politik merupakan elemen penting untuk konsolidasi demokrasi yang sehat dan substantif karena kualitas partai politik akan berpengaruh dalam menentukan keterwakilan dan akuntabilitas politik. Partai politik memiliki peran sentral menyalurkan aspirasi masyarakat mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara dengan memainkan peran sebagai penghubung strategis antara pemerintah dengan warga negara.

Peran fundamental lainnya dijalankan oleh partai politik adalah secara formal hanya partai politik yang diakui dan diatur secara sah berfungsi sebagai lembaga yang menciptakan

wakil rakyat di pemerintahan (Haramain dan Nurhuda, 2000). Partai politik menjadi signifikan sejak reformasi 1998 dengan diundangkannya paket Undang-Undang Politik

tahun 1999. Meskipun reformasi termasuk menyentuh perubahan signifikan dalam sistem perwakilan dan partai politik, namun masih banyak kesenjangan antara peran ideal partai politik yang dituntut dalam reformasi dan kondisi empiris partai politik, misalnya adanya keberlanjutan karakteristik partai politik dengan era sebelum reformasi dimana partai politik tidak memiliki platform ideologi yang jelas dan hanya mendasarkan diri pada praktek bagi-bagi kekuasaan demi kepentingannya sendiri, sehingga partai politik membentuk relasi kartel (Slater, 2004; Ambardi, 2008) ataupun menjadi predator kekuasaan dalam demokrasi (Robison dan Hadiz, 2004). Dalam kondisi seperti itu terjadi tarik menarik antara peran ideal partai politik dengan kondisi empiris kepentingan partai politik menunjukkan anomali seperti terlihat dari perolehan hasil Pemilu 2024, dimana pemenang pemilihan Presiden, yaitu pasangan H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak terakumulasi menjadi *bandwagon effect*, dampak ikutan yang berbanding lurus/linier dengan perolehan kursi partai politik pemilihan legislatif di DPR asal Presiden, yaitu partai Gerindra.

TINJUAN PUSTAKA

Bandwagon Effect

Bandwagon berasal dari bahasa Inggris berarti kereta atau kendaraan pengangkut pemusik atau band dari tradisi kebudayaan barat dan dipopulerkan pertama kali dalam politik oleh seorang anggota sirkus, Den Rice tahun 1848 yang mencari perhatian dalam kampanye politik berkeliling ke negara-negara bagian Amerika Serikat untuk mendukung pemilihan calon Presiden, Zachary Taylor yang ikut serta di dalam kereta sirkusnya dan meraih sukses menjadi Presiden Amerika Serikat terpilih ke-12 pada tahun 1849. (<https://politicaldictionary.com/words/bandwagon/> diakses 15 April 2024). Label secara metafora, fenomena ini menunjukkan politik Amerika akhir abad ke-19 dan menyinggung *wagon/kendaraan* dalam sebuah parade yang membawa band/sirkus dan melakukan atraksi pada kerumunan massa untuk mengikuti band/sirkus menikmati pertunjukannya.

Gagasan *bandwagon effect* sangat menarik bagi para ilmuwan sosial sejak awal 1937 (Robinson, 1937) walau secara empiris sangat sulit dipahami. *Bandwagon effect* merupakan manifestasi dalam beragam situasi dan bentuk yang paling banyak didiskusikan dalam pemilu (Bartels, 1998; Lanoue & Bowler, 1998; Schmitt-Beck, 1996). Beberapa tahun belakangan studi *bandwagon effect* berhasil menunjukkan eksistensinya berkaitan dengan sikap untuk memilih pada pemilu dan referendum, seperti yang terjadi pada pemilihan presiden Amerika Serikat berbasis *exit poll* di pantai timur Amerika.

Bandwagon effect adalah salah satu dari beberapa manifestasi hipotesis sebagai pengaruh impersonal berdampak pada sikap individu, kepercayaan, atau perilaku yang berasal dari impresi pribadi tentang sikap, kepercayaan, atau perilaku kolektif tidak dikenal lainnya diluar lingkungan kontak personalnya (Mutz, 1998). Contoh lain adalah *underdog effect* (Simon 1954) yang melengkapi *bandwagon effect* melalui pernyataan dampak negatif dari mayoritas atau opini dominan, terutama untuk pemilu sebagai gagasan strategis harapan para calon untuk mendukung alternatif terbaik pada pemilu. Kondisi awal *bandwagon effect* merupakan penerimaan personal terhadap kumpulan fenomena pada realitas pengalaman personalnya, sehingga tidak dapat diamati secara langsung sebagai referensi sikap pribadi dan formasi preferensi sebuah fakta sosial.

Impresi individu terhadap opini atau distribusi preferensi kolektif dapat memulainya dari beragam sumber. Latar belakang paling banyak adalah rasionalisasi sederhana atau proyeksi melalui dukungan sosial luas pada sebuah posisi. Efek *looking glass* mudah terungkap pada perubahan persepsi opini massa yang dikenal sebagai *false consensus* atau pengabaian pluralistik. Komunikasi interpersonal adalah basis lainnya untuk impresi distribusi opini umum, namun juga secara sistematis terjadi bias yang berlangsung pada homogenitas

lingkungan dasar. *Bandwagon effect* juga telah diklaim menjadi kekuatan penting di belakang fenomena dinamis protes kolektif. Disamping konsekuensi perilaku tertentu, penerimaan opini yang terdistribusikan dalam media massa dan lembaga survei sebagai tidak berimbang terhadap sebuah posisi dapat juga membuat perubahan sikap dalam isu politik (Marsh, 1985; Nadeau, Cloutier, and Guay 1993).

Media massa modern selalu mencoba menemukan cara untuk menawarkan pada audiens sebuah cermin, melihat isu politik, memonitor partai politik dan popularitas politisi secara umum. *Polling* sebagai sebuah bentuk penerapan penelitian sosial dan media massa sebagai penyampai hasrat melayani pelanggan pelaku *polling* dalam hubungan simbiosis memberikan informasi identik kepada publik. Lompatan ke depan jurnalistik terfokus pada siapa yang memimpin dan siapa yang mengikuti jejak di belakang isu substantif massif merubah informasi politik tentang pemilu pada banyak demokrasi modern. Jurnalis dan pelaku *polling* kemudian menjadi sumber kunci pernyataan perantara tentang posisi politik publik dan simpatisannya.

Bandwagon effect dapat juga menjadi konsekuensi bagi proses tidak langsung yang dilakukan oleh aktor politik (Mutz, 1998). Persepsi terhadap dukungan popularitas berdampak pada pilihan aktivis tentang partai atau kandidat untuk mendukung melalui donasi atau kerja relawan dalam kampanye. Sumber daya ini menjadi corong strategis untuk mendukung dan aktif bekerja secara elektoral memungkinkan mereka berjalan penuh tenaga dan lebih memengaruhi kampanye.

Partai Politik

Sejarah demokrasi Athens menunjukkan praktik pemerintahan rasional abad modern dengan partai politik sebagai organisasi formal dalam melakukan beragam proses pengisian jabatan publik dan melakukan kontrol terhadap kebijakan publik (Anckar and Anckar, 2000), di mana partai politik diakui secara luas telah melahirkan demokratisasi pemerintahan. Rotasi pemerintahan dapat dilaksanakan secara periodik dan kompetitif melalui partai politik dalam pemilihan, sehingga proses pemerintahan dan kebijakan publik dapat dikontrol sebagai representasi rakyat melalui parlemen/lembaga legislatif, dimana suara rakyat diorganisir oleh partai politik sesuai dengan basis ideologi dan kepentingannya membentuk masyarakat madani yang konstitusional dan berperan melakukan revitalisasi demokrasi pemerintahan dari watak primitif koruptif dan feodalistik menjadi pilar penyangga demokrasi (Asshiddiqie, 2007:710) dalam dinamika kehidupan demokrasi modern (Schattschneider, 1942).

Sejak awal demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang diperoleh dari, oleh dan untuk rakyat (*from the people, by the people, of the people*). Rakyat memiliki peran dan posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat menentukan sebuah sistem pemerintahan dan pemerintah melalui partisipasi warga negara baik secara langsung atau melalui perwakilan. Untuk menjamin keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan yang objektif, sistem politik harus menjamin kebebasan dan kesetaraan setiap warga negara di dalamnya, tanpa rasa takut, intimidasi, paksaan, dan penipuan. Demokrasi menjadi wadah dan sarana bagi rakyat untuk menentukan nasibnya di bawah pemerintahan yang ia pilih. Perjalanan demokrasi menurut Dahl (dalam Fatah, 1994:10) mengalami transformasi dari tahap sederhana dengan lingkup terbatas dan kecil, menjadi demokrasi lebih luas dalam praktik republikanisme, perwakilan, dan logika persamaan, kemudian berkembang dalam kehidupan politik modern yang kompleks dengan ciri kegamangan dan ketidakpastian terhadap pencarian sumber ketidaksamaan untuk melaksanakan persamaan dalam masyarakat atau malah kembali pada demokrasi Athens.

Persoalan dalam praktik demokrasi modern masih terdapat makna ambigu demokrasi itu sendiri pada tataran praksisnya, yaitu lembaga demokrasi atau cara dalam melaksanakan demokrasi atau keadaan kultural dan historis yang memengaruhi demokrasi diterapkan. Bentuk pelembagaan demokrasi adalah politik representatif pada partai politik. Sistem representasi telah berkembang jauh sebelum munculnya partai politik, betapapun bentuk dan karakter partai politik dipengaruhi oleh kerangka sosial politik masyarakat.

Sistem perwakilan atau partai politik merupakan wadah merespon dan membangun sendi memperkuat kelangsungan demokrasi dan pemerintahan konstitusional.

Partai politik berkaitan dengan kebutuhan sistem politik dan konstitusi organisasi pemerintahan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Menurut Duverger (1959:1), kata 'partai' menggambarkan peristiwa beragam, mulai dari faksi-faksi dalam republik masa lalu, pasukan yang terbentuk di sekitar *condotieri* pada renaissance Itali, klub-klub tempat berkumpul para anggota Dewan Revolusi, komite yang menyiapkan pemilihan umum dalam monarki konstitusional, dan organisasi sosial yang membentuk opini publik di negara-negara demokrasi modern. Pemaknaan kata 'partai' memiliki kesamaan esensi dan orientasi yakni pelembagaan yang berperan memenangkan kekuasaan politik dan menerapkannya.

Istilah partai politik pertama kali muncul tahun 1850, namun manifestasinya belum dikenal seperti dalam arti modern. Tahun 1950 manifestasi partai politik dikenal secara fungsional politik maupun ketatanegaraan. Proses peralihan di setiap negara mengalami perkembangan berbeda-beda, sejalan dengan sejarah dalam pendirian partai politiknya. Sebelum terbentuknya partai, sarana pemenangan pemilu adalah melalui peran kelompok atau asosiasi masyarakat yang memiliki pengaruh kuat, namun tidak dapat mengorganisir pilihan secara tepat.

Suara mengalir tak terarah dan sekadar seremonial semata, seperti yang terjadi di Amerika Serikat sebelum kemunculan partai politik, pemilih tidak mengetahui tujuan dan prospek pilihan dan relevansinya dengan mereka sebagai memilih, sehingga proses pemilihan hanya menghasilkan 'Republik Para Bangsawan atau Republic of Dukes'. Pilihan hanya berdasarkan dan ditujukan pada mereka yang memang dikenal baik dalam relasi kerja atau dalam hubungan sistem feodalistik seperti para kelompok elite bangsawan. Hal yang sama juga terjadi di Perancis tahun 1817, dimana rakyat hanya memilih tuan-tuan tanah di wilayahnya, karena tidak memiliki sarana dan kemampuan mengorganisir diri dan mengarahkan suara pada pejabat sesuai dengan kepentingan atau ideologinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen terkait *bandwagon effect*, pemilu, dan partai politik yang lebih mengarah kepada eksploratif, karena data tidak terikat pada teori tertentu (Neuman, 2000). Kajian ini merupakan upaya untuk menjelaskan atau menganalisis individu, organisasi, kelompok atau pola interaksi sosial yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan menginterpretasikannya melalui pemberian makna, menerjemahkan, atau menjadi data itu sendiri (Patten&Newhart, 2018), dimana *bandwagon effect* pemilu Presiden berkontribusi pada perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif.

Jenis penelitian kualitatif dalam kajian ini adalah studi kasus yang memfokuskan pada kasus tertentu dari sebuah fenomena dengan maksud untuk melihat peristiwa, hubungan, pengalaman, atau proses dari sebuah kasus secara mendalam untuk membantu penulis menghubungkan tingkat mikro atau kegiatan seorang individu terhadap tingkat yang lebih makro atau pada skala yang lebih besar melalui struktur sosial dan proses (Neuman, 2000). Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang tersebar dalam bentuk karya tulis atau makalah, artikel, dokumen resmi, atau pemberitaan media massa yang relevan dengan kebutuhan topik kajian.

Pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kenyataan sosial yang tidak dapat diperoleh dengan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain melalui pengukuran/kuantifikasi untuk menunjukkan tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, ataupun hubungan kekerabatan (Creswell et al. 2018). Sumber data sekunder spesifik kemudian dinalisis dan disajikan untuk menggambarkan situasi secara eksploratif yang

memiliki kelebihan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah terhadap fenomena yang dikaji melalui relasi partai politik, pemilu, dan dampak ikutannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Bandwagon Effect* pada Pemilu 2024**

Pemilihan umum serentak antara pemilu Presiden (pilpres) dengan pemilu legislatif (pileg) DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sudah berlangsung di Indonesia selama empat kali pemilu dimulai tahun 2014 sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan putusan setelahnya dengan melakukan reformulasi pemaknaan Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945 yang menggunakan pendekatan penafsiran *original intent*, sistematis, dan gramatikal dalam memaknai pelaksanaan pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden.

Substansi pemilu serentak diyakini sebagai jalan keluar dari demokrasi yang tidak berjalan baik menimbulkan perpecahan, keos (*chaos*), dan disintegrasi bangsa dengan harapan proses pemilu terselenggara dengan fair, objektif, dan transparan. Tentunya hasil pemilu dapat melahirkan pemerintahan yang memperoleh legitimasi kuat dari warga bangsa. Penyelenggaraan pilpres dan pileg yang dilangsungkan serentak diharapkan memberikan efisiensi dalam banyak hal, diantaranya: pertama, pemilu serentak diharapkan dapat menghemat penggunaan uang negara untuk pembiayaan penyelenggaraan pemilu, sehingga penghematan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan negara mencapai tujuan negara lainnya, utamanya memajukan kesejahteraan rakyat. Kedua, pemilu serentak diharapkan dapat mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Lebih dari itu, pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menjadi sarana pendidikan politik (*political education*) bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, karena setiap warga negara dapat turut memiliki andil dalam membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri (Humas MKRI, www.mkri.id diakses, 5 April 2024).

Pemilu 2024 memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan pemilu sebelumnya dari sisi populasi pemilih, dimana pemilih muda dari generasi milenial dan generasi Z merupakan mayoritas berjumlah sekitar 55% sampai 60% dengan rentang usia antara 17 s/d 40 tahun. Dengan jumlah pemilih muda yang dominan tersebut, di satu sisi akan memberi peluang berperan sebagai *agent of change* dan *agent of control* dalam pemilu disebabkan sangat familiar dengan teknologi dan informasi aktual. Dengan kemampuan tersebut, kaum muda mampu aktif berkiprah dan berkontribusi dalam menyebarluaskan pilihan tokoh politiknya untuk pilpres dan pileg. Di sisi lain, pemilih muda secara psikologis memiliki kerentanan dalam menentukan pilihan politiknya terkadang irrasional dan bahkan mudah terpengaruh oleh stimulus eksternal dari teman sebaya atau informasi massif kaum muda, terutama melalui media sosial. Kerentanan tersebut disebabkan oleh minimnya kesadaran politik, pemahaman yang kurang tentang demokrasi, dan rendahnya pendidikan politik pemilih kaum muda (Elen Pitria et al. 2023). Kondisi seperti yang dialami oleh kaum muda sebagai ikut-ikutan itulah yang lekat dengan konsep *bandwagon effect* atau takut ketinggalan informasi, kehilangan momen, dan tidak *up to date* yang dikenal sebagai perilaku *Fear of Missing out, FoMo* (Mc Ginnis, 2004).

Media dan lembaga survei menjadi bagian inheren menyatu dalam kontestasi politik di banyak negara demokrasi seperti yang terjadi dalam pertarungan pilpres Amerika tahun 1824, hasil survei the Aru Pennsylvanian menyebutkan bahwa Andrew Jackson akan memenangi kursi presiden mengalahkan pesaingnya John Quincy Adams, dan terbukti hasilnya sama dengan survei tersebut. Indonesia sebagai negara demokrasi tidak luput juga dari peran lembaga survei atau jajak pendapat dalam perhelatan pemilu, terutama pilpres dan pilkada. Publik disugahi opini oleh media komunikasi modern yang secara mandiri atau bekerjasama dengan lembaga survei melakukan jajak pendapat atau survei khususnya terhadap setiap capres setidaknya tiga bulan menjelang pelaksanaan pilpres 2024 dan mengumumkan hasilnya rata-rata satu bulan dua kali atau per dua minggu sekali atau paling tidak satu bulan sekali.

Semua lembaga survei, seperti PWS, LSI, LSI Denny JA, Indikator Politik, Charta Politika, Indobarometer, SMRC, Poltracking, ISC, SPIN, Ipsos, Median, PRC merilis hasil surveinya dan semuanya memenangkan capres H. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan rentang antara 52% sampai 58% dibandingkan kandidat capres H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D - Dr. (HC) H.A. Muhaimin Iskandar dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P - Prof. Dr. H. Moh. Mahfud yang memperoleh 20%-30% dan 15%-25%. Lembaga survei juga merilis pilihan kaum muda terhadap capres Prabowo Subianto mengalami peningkatan dari waktu ke waktu mendekati pelaksanaan pemungutan suara. Tren peningkatan penerimaan, kedikenalan, dan kesukaan sosok Prabowo Subianto oleh pemilih muda, bila merujuk data statistik mencapai 55% memberikan dampak signifikan memenangkan kontestasi Presiden periode 2024-2029. Selain pemilih kaum muda rentan kondisi psikologis, publik terutama kaum muda dibanjiri oleh informasi secara massif melalui media mainstream dan beragam kanal media sosial memberikan *bandwagon effect* kepada pemilih muda yang belum menentukan pilihan dan banyak berkontribusi terhadap kemenangan Prabowo Subianto.

Pada kondisi peran media dan lembaga jajak pendapat berperan sebagai pembentuk opini publik, maka terjadilah *horse-race journalism* atau jurnalisme pacuan kuda dan konsep terkait seperti game-framing dan jurnalisme opini publik yang disebutkan oleh (Toff, 2020), dimana dampak jajak pendapat terhadap proses politik pilpres acapkali digunakan sebagai alat pembentuk opini publik untuk menarik dan meyakinkan pemilih menentukan pilihan capres yang unggul dalam jajak pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga survei. *Bandwagon effect* bertaut lanjut dengan *horse-race journalism* yang menjelaskan secara mendalam posisi kebijakan kandidat (HICSS, 2022) merupakan upaya signifikan politisi untuk meraih kemenangan sebagai strategi meningkatkan persuasi politik dan kampanye mendongkrak perolehan suara. Bekerjanya kedua persuasi politik tersebut akan memberikan gambaran jelas kepada masyarakat pemilih khususnya bahwa keunggulan salah satu calon Presiden 2024, yaitu Prabowo Subianto menjadi pilihan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai pilihan banyak orang merupakan pilihan terbaik. *Bandwagon effect* dan *horse-race journalism* berkontribusi positif terhadap calon pemimpin amanah sesuai dengan harapan *the founding fathers* dalam konstitusi. Namun bila tidak sesuai dengan penerapan teori sosial dalam partisipasi pemilih, Hinich (1981) mengemukakan bahwa individu perlu memikirkan manfaat atau utilitas apa yang diperolehnya memberikan suara kepada orang lain, atau ungkapan Morton and Ou (2015) dimana individu perlu mencari informasi terkait kandidat pemimpin yang akan dipilih dengan kesadaran bahwa suaranya berharga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Survei merupakan perhitungan statistik dan sebagai bagian dari penelitian sosial berbasis ilmu pengetahuan kadang sulit terhindar dari bias pemahaman terhadap hasil-hasil yang dikeluarkannya, terutama ketika terselip muatan kepentingan di dalamnya, terutama menyangkut politik elektoral, khususnya kontestasi pilpres yang diikuti oleh dua atau tiga kandidat memperebutkan ratusan juta suara pemilih seperti di Indonesia, disebabkan terhubungan langsung dan tidak langsung dengan pembentukan opini publik, meski telah melalui prosedur dan tahapan penelitian ilmiah, menjadi relevan apa yang diungkapkan oleh budayawan/seniman klasik Jerman, Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832) dalam karya terkenalnya *Faust* melalui pernyataannya: "*Was diese Wissenschaft betriff, es ist so schwer den falschen Weg zu meiden*", 'apa yang terdapat dalam ilmu pengetahuan ini sangat sulit menghindari kekeliruan untuk memahaminya'. Terkadang hasil survei menjadi penguatan opini publik yang menuntun *undecidedvoters* dan *swing voters* menentukan pilihan sesuai mayoritas hasil survei.

Pada titik ini, konsep *bandwagon effect* dan *horse-race journalism* menunjukkan relasi kuatnya, sehingga muncul anekdot tentang pemilu: "berkat survei (massif), kemenangan telah diraih sebelum bertarung", dimana masyarakat pemilih yang belum menentukan pilihan terhadap calon presiden dalam waktu dua bulan menjelang pemilu 2024 menurut

jajak pendapat Litbang Kompas 29 November-4 Desember 2024 berada di angka 28,7% untuk *undecided voters* dan 24,9% *swing voters* pada pilihan capres tanpa pasangan (<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/11/07194451/survei-litbang-kompas-pilpres-2024/> diakses 5 April 2024).

Survei tersebut menyebutkan *undecided voters* adalah kelompok yang belum punya ikatan ideologis ataupun kedekatan emosional terhadap sosok atau pasangan tertentu dan berasal dari bekas pemilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang masih rentan berubah pilihan, sebagian lain adalah pemilih yang tidak menggunakan haknya atau merahasiakan pilihannya pada pemilu 2019. Kebanyakan merupakan generasi tua dalam rentang usia 41-60 tahun sebagian besar masuk generasi X mencapai 44,3% lebih tinggi dari populasi kelompok ini sekitar 36% dengan mayoritas 54,2% *undecided voters* adalah kalangan perempuan, tinggal di pedesaan, dan lebih banyak berpendidikan dasar. Sedangkan warga Nahdlatul Ulama dari kalangan Islam menjadi kelompok masyarakat yang lebih bimbang dibandingkan dengan pemeluk agama lainnya.

Dua kelompok tersebut menjadi penentu, apakah pilpres akan berlangsung satu putaran atau dua putaran, bila melihat hasil survei yang juga dikeluarkan bersamaan terhadap setiap capres, dimana pasangan Prabowo Subianto-Gibran memiliki elektabilitas tertinggi 39,3% unggul cukup jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16,7% dan 15,3%, sehingga angka survei diatas masih sangat fluktuatif signifikan bisa didongkrak untuk perolehan suara dan merubah hasil pilpres 2024.

Peran Partai Politik dalam Pemilu Presiden dan Legislatif 2024

Demokrasi modern tidak bisa dilepaskan dari peran partai politik sebagai bentuk organisasi politik yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Partai politik memastikan keterlibatan dan akomodasi aspirasi kepentingan masyarakat luas dalam kebijakan yang akan dikembalikan kepada masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Peran signifikan partai politik tidak lepas dari sejarah demokrasi modern yang menekankan pada perwakilan. Partai politik mendapat mandat konstitusional untuk mengajukan calon-calon wakil rakyat baik di legislatif maupun eksekutif. Dibandingkan dengan kelompok kepentingan dan kelompok masyarakat sipil, partai politik memiliki peran sentral yang mencakup dua dimensi (Meyer, 2012: 28), pertama, partai politik mengagregasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat lalu mentransformasikannya menjadi agenda yang akan membentuk platform dalam Pemilu untuk menarik minat dan kepercayaan orang banyak agar partai mendapat kursi mayoritas di parlemen yang memengaruhi pembuatan kebijakan. Kedua, partai politik merupakan satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik mengikat.

Dalam perjalanannya, partai politik berkembang dengan beberapa tipologi, secara umum terbagi ke dalam tiga tipe: yaitu: (1) partai elit (*elite party*), partai yang dibentuk dan merepresentasikan kepentingan kelompok elit (di masa lalu bangsawan); (2) partai massa (*mass party*), dibentuk oleh kelompok masyarakat untuk mengaspirasikan kepentingan masyarakat di akar rumput (*grassroot*). Keduanya merepresentasikan nilai yang berbeda. Partai elit umumnya menganut nilai-nilai lama (konservatif dan liberal), sedangkan partai massa menganut nilai-nilai baru (sosialisme dan komunis). Dua ideologi kontras ini tidak lagi dominan satu sama lain di masyarakat sehingga sudah jarang dijadikan platform untuk menarik dukungan pemilih oleh partai politik. Dari konteks tersebut muncul tipologi baru yang disebut (3) *catch-all party*, atau partai lintas kelompok (Kirchheimer, dalam Amal 1988:71-90). Partai lintas kelompok ini didasarkan pemikiran bahwa masyarakat memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya dan lebih memajukan pilihan rasional daripada ideologi klasik. Isu- isu dan kepentingan berkembang secara majemuk, dimana partai politik berada dalam posisi untuk mengakomodirnya bila ingin memenangkan kekuasaan. Karenanya, ciri khas partai ini adalah inklusifitas, pluralis, non-sektarian, dan non-diskriminatif.

Diamond and Gunther (2003), mengkritisi tipologi partai politik di atas, karena merepresentasikan perkembangan partai politik di Eropa Barat, tetapi tidak bisa diaplikasikan untuk melihat perkembangan partai politik di wilayah lain di dunia, termasuk

Asia Tenggara, kemudian membaginya berdasarkan tiga kriteria, yaitu: pertama, sifat dari keorganisasian partai, kedua, orientasi atau komitmen pragmatik partai, dan ketiga, norma perilaku partai, apakah toleran atau proto-hegemonik dan tidak terlalu loyal atau bahkan anti dengan aturan demokrasi yang mengedepankan keberagaman. Dari tiga kriteria itu, secara lebih kompleks Gunther dan Diamond membangun lima pengelompokan yang diistilahkan dengan genus, yakni: partai berdasarkan kekuatan elit (*elite-based party*), massa (*mass-based party*), etnisitas (*ethnicity-based party*), elektoral (*electoralist party*), dan berdasarkan kekuatan gerakan (*movement party*), seperti dalam tabel di bawah ini:

Genus	Spesies
Partai elit	Partai Lokal Partai Klientelistik
Partai Massa	Partai Denominasi Partai Fundamentalisme Agama Partai Pluralis-Nasionalis Partai Massa berbasis Kelas Partai Leninis
Partai Etnisitas	Partai Etnis Partai Kongres
Partai Elektoral	Partai Personal Partai Lintas Kelompok (<i>Catch-All Party</i>) Partai Programatik
Partai Gerakan	Libertarian-Kiri Partai Ekstrim Kanan

Tabel 1
Tipologi Partai Politik Versi Gunther dan Diamond (2003)

Dalam konteks Indonesia, tipologi partai ini tidak mutlak bisa diterapkan, dimana beberapa spesies bisa masuk pada genus yang berbeda, atau bahkan ada bentuk-bentuk genus lain yang tidak tercatat dalam kategorisasi ini. Politik aliran yang diidentifikasi Clifford Geertz (1960) mendominasi partai politik di era kepemimpinan Soekarno periode tahun 1955 hingga 1965 dengan tiga spesies, yakni santri, abangan, dan priyayi. Meskipun selama rezim Orde Baru diupayakan penghapusan aliran-aliran ini, namun masih ada keberlanjutan atau minimal upaya mengidentifikasi lagi partai politik pasca 1998 dengan partai aliran di era 1955 ini (Ufen, 2006; Haris, 2014; Mietzner, 2008).

Sebagian lagi partai politik masuk dalam genus partai elit (*elite-based parties*) dengan struktur organisasi yang tidak kuat dan cenderung mengandalkan kekuatan elit bersama kelompoknya dalam satuan wilayah tertentu, hubungan patron-klien sangat kental dan partai tidak memiliki platform ideologi yang jelas, serta partai elektoral (*electoralist parties*) juga tidak memiliki struktur organisasi yang kuat, namun menyandarkan kekuatan tokohnya dalam upaya penguasaan massa pemilih (*personalistic parties*) sebagai kendaraan untuk mengantarkan individu tokoh menjadi penguasa. Selain itu, ada juga partai politik yang masuk dalam genus partai elektoral lintas kelompok (*catch-all parties*) bersifat plural dan moderat yang berupaya menghimpun sebanyak mungkin kelompok-kelompok sosial, pengecualian kepada PKS, dalam tipologi ini masuk dalam genus partai massa (*mass-based parties*) jenis hybrid antara partai fundamentalis agama (*fundamentalist-religious parties*) dan partai denominasi (*denominational parties*), dengan kecenderungan klientalisme dan pragmatisme di dalam penentuan kandidat politik (Tomsa, 2013; Nainggolan, 2016:13-15).

Kontestasi pilpres 2024 dilihat dari tipologi parpol pendukung masing-masing capres bisa diasumsikan merupakan kompetisi koalisi parpol elektoral dan lintas kelompok, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN melalui representasi sosok capres Prabowo Subianto dengan koalisi partai massa, elektoral, dan lintas kelompok, yaitu PDI Perjuangan, PKB, NasDem, dan PKS yang terbagi ke dalam dua sosok capres, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari ketiga kandidat mencerminkan tiga latar belakang yang berbeda, Prabowo Subianto adalah pendiri dan ketua partai Gerindra yang dibentuk 6 Februari 2008 asebagai kendaraan politiknya mengusung cawapres 2009 serta capres 2014 dan 2019, setelah purna tugas berkarir di militer dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga dan memperoleh jenderal bintang empat kehormatan, kemudian menjadi Menteri Pertahanan pada kabinet Joko Widodo periode 2019-2024.

Kemenangan Prabowo Subianto menjadi Presiden 2024-2029 tidak berbanding lurus dengan partai pengusungnya, yaitu Gerindra dalam kontestasi pileg tidak bisa menjadi pemenang menguasai kursi mayoritas parlemen. Ada tesis dalam pemilu bahwa partai pengusung capres akan meningkat elektabilitasnya, bila berkaca dari tiga pemilu terakhir, yaitu 2009 memunculkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangi kursi Presiden dengan perolehan suara mayoritas 60,8%, sedangkan partai Demokrat yang baru didirikannya mencetak sejarah dengan meraih suara yang mengejutkan dan tidak diprediksi sebanyak 21.703.137 suara atau 20,85% memperoleh kursi mayoritas di parlemen, meski belum memiliki basis elektoral kuat seperti PDI-P dan Golkar. Demikian pula dua pemilu terakhir terjadi hal yang sama pada PDI-P menjadikannya pemenang pileg dan pilres dengan mengusung Joko Widodo.

Kemenangan Prabowo Subianto menduduki tampuk kekuasaan sebagai Presiden pada pilpres 2024 yang tersebar secara geografis menguasai mayoritas suara pemilih di 36 provinsi dari jumlah 38 provinsi di Indonesia. Kemenangan Prabowo Subianto tidak linier berbanding lurus dengan dukungan mayoritas pemilih terhadap calon legislatif Gerindra, parpol kendaraan politik yang didirikannya untuk mengantarkan kader-kadernya menguasai kursi mayoritas parlemen, seperti Demokrat dan PDI-P pada pemilu 2009, 2014, dan 2019. Berkaca dari hasil pada pileg 2014, Gerindra memperoleh 14,8 juta suara atau 14,75% suara sah nasional menempati posisi ketiga terbesar di belakang PDI-P dan Golkar, kemudian meningkat perolehan suaranya menjadi 17,59 juta suara atau 12,57% pada pemilu 2019 posisinya naik menempati urutan kedua setelah PDI-P.

Kondisi tersebut menunjukkan kinerja historis dan potensi Gerindra yang semakin berkembang menjadi salah satu parpol besar dan kekuatan politik utama di Indonesia. Namun tesis diatas yang terjadi pada Demokrat dan PDI-P tidak terjadi pada Gerindra dalam pileg 2024, dimana perolehan suara caleg partai berlambang garuda berwarna emas ini tidak terdongkrak menjadikan mayoritas peraih kursi mayoritas parlemen dengan 20.071.708 suara atau 13,22%, bahkan turun ke peringkat ketiga dibawah PDI-P yang tetap bertahan di peringkat pertama meski turun cukup tajam 6,16% raihan suaranya menjadi 25.387.279 atau 16,72% dan Golkar naik fantastis 34,7% ke peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 23.208.654 atau 15,28%, bahkan berkah elektoral legislatif didapatkan oleh parpol bukan pendukung pemenang pilpres, yaitu PKB dan PKS yang melonjak signifikan dua digit perolehan suara masing-masing 14,1% dan 11%.

Perolehan suara parpol di setiap provinsi mengalami dinamika dan fluktuasi dengan terjadi pergantian penguasa di 20 provinsi, Golkar mengembalikan reputasinya menguasai 14 provinsi yang bertambah lima provinsi dari pileg 2019, PDI-P dengan 12 provinsi yang turun kuasanya dari 17 provinsi pada pileg 2019, dimana kehilangan dominasi di sembilan provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Maluku. Namun PDI-P menjadi penguasa baru di Nusa Tenggara Timur dan Papua, bahkan menguasai dua provinsi baru, Papua Tengah dan Papua Selatan. Gerindra unggul hanya di lima provinsi, NasDem empat provinsi, serta PAN dan PKS satu provinsi.

Kenaikan suara Golkar di banyak provinsi ditengarai sebagai kepiawaian strateginya menempatkan para caleg berkualitas terbaik berlatar belakang historis daerah yang kuat sesuai dengan dapilnya dengan dukungan dan tanggungjawab ketuanya sebagai Menko

Perekonomian melakukan konsolidasi partai dengan terjun langsung memberikan bantuan sosial dan subsidi modal untuk UMPK dan PKL. Selain hal tersebut, ada faktor Jokowi effect yang menunjukkan kedekatan relasi Golkar dengan Joko Widodo memberi dampak positif keberpihakan Jokowi yang kemudian menjadi modal kuat menyasar kelompok masyarakat lebih beragam dari kalangan muda, pendidikan dan penghasilan lebih tinggi, sehingga keluar dari pakem tradisionalnya yang selama ini lebih berfokus pada daerah belum maju dan terbelakang dengan jangkauan daerah pemilihan (dapil) yang lebih luas. Hasilnya terbukti melalui dominasinya menguasai salah satu provinsi dengan kompetisi caleg sangat ketat dan sering disebut dapil neraka, yaitu Jawa Barat.

KESIMPULAN

Pemilihan Presiden dan legislatif yang telah dilakukan empat kali serentak secara bersamaan sejak era reformasi terus mengalami dinamika dalam kehidupan politik kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pemilu 2024 telah usai dan telah diketahui hasilnya, dimana Prabowo Subianto disahkan menjadi Presiden 2024-2029 dan siapa dari partai mana para legislator juga telah diumumkan untuk menduduki kursi parlemen di senayan. Pemilu kali terjadi anomali dibandingkan dengan tiga pemilu sebelumnya, dimana parpol pengusung Prabowo Subianto, yaitu Gerindra tidak memperoleh berkah politik elektoral *bandwagon effects* ditambah *horse-race journalism* untuk menguasai mayoritas perolehan kursi legislatif. Padahal tidak kurang dari sepuluh lembaga survei yang melakukan jajak pendapat, semua merilis hasilnya memberi kemenangan bagi Prabowo Subianto, sebaliknya malah *bandwagon effects* terjadi pada parpol bukan berasal dari Presiden yang perolehan suaranya terbang signifikan dua digit.

Hasil jajak pendapat lembaga survei sering menjadi acuan masyarakat karena mengetahui keterpilihan tiap kandidat di ajang kontestasi pilpres dan pileg. Kondisi ini masih sangat signifikan bisa mendongkrak perolehan suara dan merubah hasil pemilu, sehingga eksistensi lembaga survei menjadi penting. Namun perannya juga bergeser dan terbagi dua dari awalnya didorong keingintahuan akademis dan kepentingan kuat mencegah manipulasi pada pemilu, kemudian berkembang bukan hanya memaparkan hasil surveinya saja, tetapi juga pemberi advis bagaimana cara caleg dan eksekutif memenangkan pemilu. Beragam cara dilakukan, seperti menciptakan citra tertentu, mengatur dan menjalankan kampanye, menyebarkan janji melalui beragam kanal media, serta merancang platform untuk membantu mengalahkan kompetitornya. Peran inilah yang menjadikan lembaga survei menjadi ajang bisnis dengan mematok tarif bayaran yang terbilang aduhai sangat menggiurkan. Peran bisnis ini bisa menimbulkan persoalan lainnya juga berupa manipulasi, komersialisasi, dan potensi keberpihakan terhadap siapa yang membayarnya dalam pemilu pasca reformasi, seperti diungkapkan seorang Indonesianis Mietzner (2009) dalam risetnya "*Political Opinion Polling in Post-authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation*" dan mengukuhkan lembaga survei dengan hasil surveinya bisa memenangkan kontestasi pemilu tanpa pertarungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amal, I. (2012). *Transformasi Sistem-sistem Kepartaian Eropa Barat, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: BIP. Gramedia.
- Bartels, L. M. (1988). *Presidential Primaries and the Dynamics of Public Choice*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Creswell, J. W. & Creswell, J.D. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5th Eds*. California: Sage Publications, Inc.

- Duverger, M. (1959). *Political Parties: Their Organization and Activity in Modern State*. London: Wiley.
- Fatah, E.S. (1994). *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. USA: University of Chicago Press.
- Haris, S. (2014) *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Meyer, T. (2012). *Peran Partai Politik dalam Sebuah Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friederich-Ebert-Stiftung.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Mutz, D. C. (1998). *Impersonal influence: How Perceptions of Mass Collectives Affect Political Attitudes*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Nainggolan, B. dan Y. Wahyu (editor). (2016). *Kompaspedia: Partai Politik 1999-2019 – Konsentrasi & Dekonsentrasi Kuasa*. Jakarta: Litbang KOMPAS Gramedia.
- Neuman, W. et.al, (2000). *Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach, 6th Edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Patten, M. L. & Newhart, M. (2018). *Understanding Research Methods. An Overview an Essentials*. 10th Eds. New York: Routledge-Taylor & Francis.
- Robison, R. dan V. Hadiz (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge Curzon.
- Schattschneider, E.E. (1942). *Party Government*. New York: Rinehart and Company.
- Tomsa, D. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the post-Suharto era*. London: Routledge.
- Tomsa, D. dan A. Ufen. (2013). *Party Politics in Southeast Asia Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand and Philippine*. New York: Routledge.

Buku Kumpulan Artikel

- Khrennikov, A. (2020). Social Laser Model for the Bandwagon Effect Generation of Coherent Information Waves. *Entropy*, 22(5), 559. <https://doi.org/10.3390/e22050559>
- Slater, Dan. (2004). "Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition". <https://ecommons.cornell.edu/bitstreams/477f71cf-d22b-40f1-bf10-ea4c29673bec/download>
- Gunther, R. and L. Diamond. (2003). Species of Political party: a New Typology. *Party Politics*, vol.9 No. 22. London: Sage Publications.

Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel

- Haramain, A. M. dan Nurhuda, M. F. (2000). Mengawal transisi: Refleksi atas pemantauan Pemilu 1999. Jakarta: *kerjasama UNDP, PB PMII dan JAMPPI*.
- Toff, Benjamin. (2020). 24 Horse-Race and Game-Framed Journalism's Effects on Turnout, Vote Choice, and Attitudes toward Politics. *Oxford Handbooks*, 478-492. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190860806.013.24>.

Artikel dalam Jurnal/Majalah

- D. Anckar and C. Anckar. (2000). "Democracies without parties," in *Comparative Political Studies* 33. (2): 225-247. <https://doi.org/10.1177/0010414000033002003>
- Hinich, M. J. (1981). voting as an act of contribution. *Public Choice* 36, 135-140. <https://doi.org/10.1007/BF00163775>
- Lanoue, D. J., & Bowler, S. (1998). Picking the winners: Perceptions of party viability and their impact on voting behavior. *Social Science Quarterly*, 79, 361-377. <https://www.jstor.org/stable/i40108880>
- Marsh, C. (1985). Back on the bandwagon: The effect of opinion polls on public opinion. *British Journal of Political Science*, 15, 51-74. doi: 10.1017/S0007123400004063
- McGinnis, P.J. (2004). Social Theory at HBS: McGinnis' Two Fos. <https://www.harbus.org/post/social-theory-at-hbs-mcginnis-two-fos-1>

- Morton, R. B. & Ou. Kai. (2015). What motivates bandwagon behavior: Altruism or a desire to win? *European Journal of Political Economy*. Elsevier 40 (PB), 224-241. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2015.04.009
- Nadeau, R., Cloutier, E., & Guay, J. H. (1993). New evidence about the existence of a bandwagon effect in the opinion formation process. *International Political Science Review*, 14(2), 203–213. doi: 10.1177/019251219301400204
- Pitria, E. Utari, D. Marseta, Y. Sari, M. T. & Pangestu, R. A. (2023). Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(3), 210-218. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i3.2105>
- Robinson, C. E. (1937). Recent developments in the straw poll field: Part 2. *Public Opinion Quarterly*, 1, 42–52. doi: 10.1086/265122
- Sabarudin, D. (2023). Ideologi Kebangsaan, Identitas Politik dan Ekonomi Calon Presiden Prabowo Subianto dalam Program Best Results Fast 2024-2029. *JKRI, Jurnal Kebangsaan Republik Indonesia*, Vol.1, no.1, 30-43. ISSN: 3032-3096.
- Schmitt-Beck, R. (1996). Mass media, the electorate, and the bandwagon: A study of communication effects on vote choice in Germany. *International Journal of Public Opinion Research*, 8, 266–291. doi: 10.1093/ijpor/8.3.266
- Simon, H. A. (1954). Bandwagon and underdog effects and the possibility of election predictions. *Public Opinion Quarterly*, 18, 245–253. doi: 10.1086/266513

Dokumen Resmi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemenkumham: JDIH.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang Pemilihan Umum. 2017. Jakarta: KPU.

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian

Ambardi, K. (2008). The making of the Indonesian multiparty system: A cartelized party system and its origin (Doctoral dissertation, The Ohio State University). *Ohio State University and Dissertations Archive*.

Makalah Seminar, Lokakarya, Penataran

Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences, HICCS. (2022). <https://hdl.handle.net/10125/79731-978-0-9981331-5-7>.